



Manado Post (Hal. 1_1)

Senin, 6 April 2020

15 Daerah 'Keroyok' Covid-19

♦ **Rp262,4 Miliar Siap**

EDITOR : BALLADEWA SETLIGHT
PELIPUT : TIM MP

MANADO—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersama pemerintah 15 kabupaten/kota, terus bekerja keras menangani pandemic Covid-19 di Bumi Nyiur Melambai.

Masing-masing strategi dilakukan Pemprov dan daerah lainnya, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan menyiapkan anggaran dari akumulasi masing-masing daerah sebanyak Rp262,4 miliar (Manado, Bolmong, Sitaro belum ada data), untuk melawan Covid-19.

Seperti Pemprov Sulut, yang menyediakan Rp81,3 miliar dalam menyikapi virus yang berasal dari Wuhan China tersebut. "Pemprov Sulut telah melakukan pengeseran anggaran sebesar Rp 81,3 miliar yang dibagi kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kesehatan yang menangani kasus Covid-19. Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial yang berkaitan dengan social safety net," ungkap Sekprov Sulut Edwin Silangen pekan lalu.

Silangen mengatakan, pengeseran anggaran yang dilakukan tersebut sudah mengantongi persetujuan Pemerintah Pusat. Serta pengeseran anggaran yang dilakukan merupakan tindak lanjut arahan Presiden, Mendagri dan Menteri Keuangan RI yang berkaitan dengan refocusing anggaran.

► Baca **15 DAERAH**...Hal.7

TOTAL Rp262,4 Miliar

Mitra 14,8 Miliar

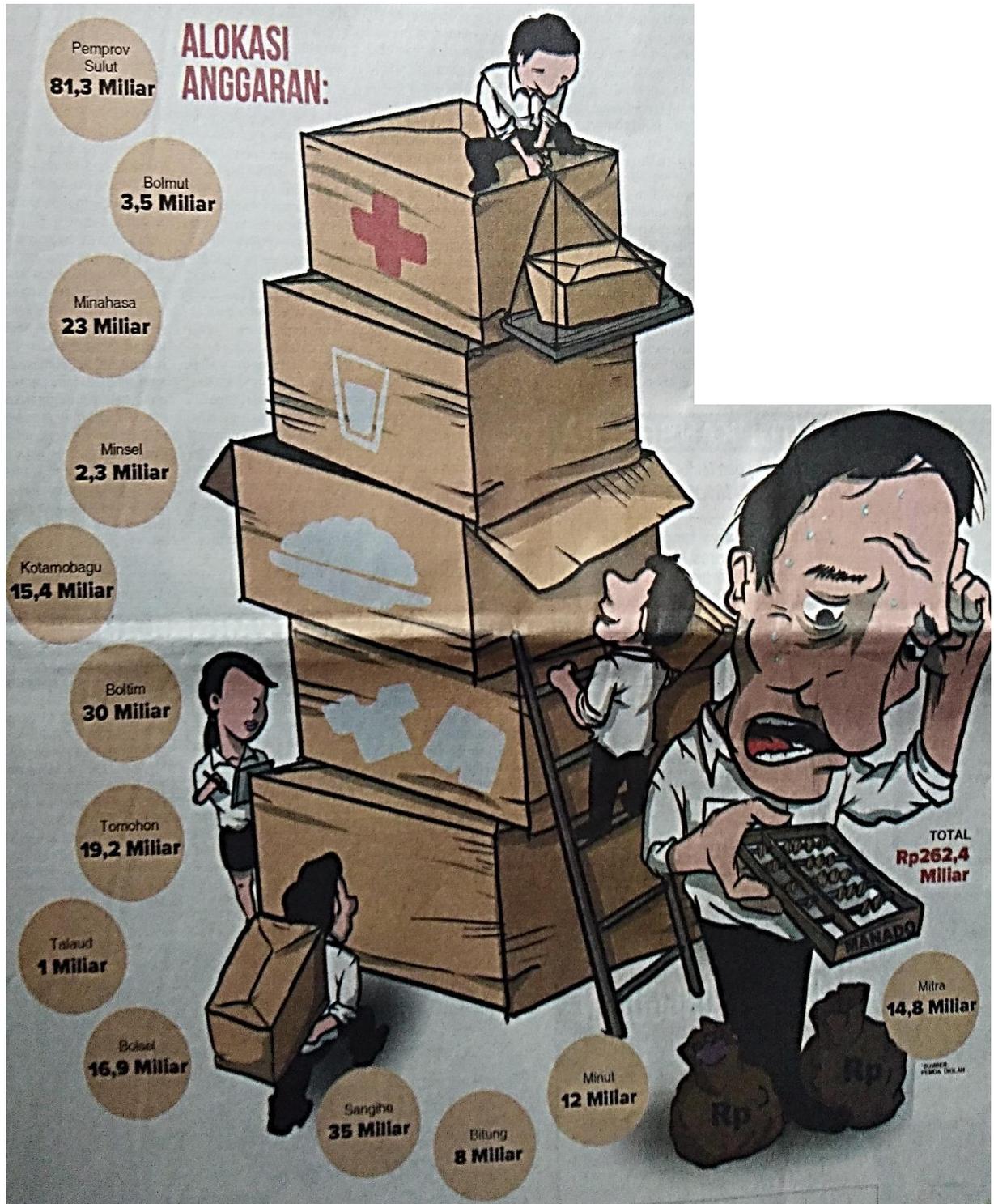
SUMBER: PEMDA DOLAH



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**
Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Manado Post (Hal. 1_2)

Senin, 6 April 2020





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Manado Post (Hal. 1_3)

Senin, 6 April 2020

15 DAERAH...

Sambungan Dari Hal: 1

"Kita mempunyai masyarakat miskin sebanyak 191 ribu yang disimulasikan dengan presentasi masyarakat miskin dan rakyat yang mengalami dampak dari Covid-19 ini. Sehingga alokasi anggaran yang kita butuhkan ini memang harus presisi dan juga sesuai dengan arahan pemerintah pusat," tuturnya.

Bukan hanya Pemprov yang menyiapkan anggaran, Kabupaten Minahasa Selatan juga telah menyiapkan amunisi Rp 2,3 miliar dalam melawan Covid-19. Disampaikan Ketua Satgas Covid-19 Erwin Schouten, pengalokasian anggaran tersebut sudah melalui pembahasan bersama TAPD yang peruntukannya digunakan untuk sejumlah program penanganan Covid-19. "Sebagaimana arahan Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dalam penanganan Covid-19, kita sudah memesan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis, cairan disinfektan, masker, hand sanitizer, hankun, dan thermo scan untuk mengukur suhu badan," bebernya.

Sementara itu, upaya Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mencegah penyebaran wabah virus corona terus dilakukan. Buktinya dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 15,4 Miliar untuk keperluan penanganan Covid-19 tersebut. "Untuk Tahap 1, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,6 miliar yang dialokasikan untuk pembelian APD. Sementara untuk Tahap 2 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12,7 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan peralatan. Total alokasi anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota Kotamobagu sebesar Rp 15,4 miliar," jelas Wali Kota Kotamobagu Ta-tong Bara.

Disisi lain, Pemerintah Kabupaten Boltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan penyebaran Covid-19. "Jadi anggaran tersebut nantinya akan disiapkan lewat Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2020," jelas Bupati Boltim Sehan Landjar.

Terpisah, Sekretaris Kota Tomohon Harold Lolowang mengatakan, kenaikan anggaran ini disesuaikan kebutuhan penanganan Covid-19. Yang mana anggaran Rp 19,2 miliar tersebut dibagi atas tiga pendanaan. "Anggarannya dibagi tiga, yaitu untuk bidang kesehatan. Lalu untuk bantuan pangan bagi pekerja tidak tetap yang terdampak Covid-19. Kemudian penanganan oleh BPBD, Dikbud dan SKPD lainnya," katanya. Tak hanya wilayah darat-

an, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud juga menyiapkan anggaran untuk melawan Covid-19. Saat dikonfirmasi koran ini, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Moktar Arunde Parapaga mengatakan, pihaknya mengalokasikan sebanyak Rp 1 miliar dan itu diambil dari dana tak terduga untuk mengatasi antisipasi Covid-19. "Namun kita akan lihat bagaimana situasi kedepan karena tidak menutup kemungkinan anggaran ini akan naik, karena akan disesuaikan dengan kebutuhan," terangnya.

Sementara itu, dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Covid-19 Pemkab Minahasa telah melakukan pengeseran anggaran tahap pertama sebesar Rp 10,5 Miliar. "Dana ini digunakan untuk percepatan penanganan Covid-19, seperti rehab rumah sakit khususnya ruangan isolasi, APD, masker, hand sanitizer dan lainnya," kata Bupati Minahasa Dr Royce Octavian Roring.

Kemudian, lanjut ROR, ada juga pengeseran anggaran tahap dua terkait Bantuan Sosial (Bansos). "Total anggaran yang digeser untuk tahap dua sebesar Rp 12,5 Miliar, dan akan diperuntukkan khusus Bansos, termasuk didalamnya keluarga pra sejahtera. Kemudian lansia, disabilitas, tukang ojek, sopir, kusir bendi dan sebagainya," ungkap Bupati. Ditotalkan berarti Pemkab Minahasa sepakat menggelontorkan dana Rp 23 Miliar guna penanganan Covid-19 termasuk Bansos bagi masyarakat terdampak.

Disisi lain, Bupati Kabupaten Bolsel Iskandar Kamaru menyampaikan, bahwa pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan Covid-19. "Selain itu, kami melakukan pengeseran anggaran sebesar Rp 16,9 miliar diperuntukkan untuk pencegahan Covid-19 ini," ujar Kamaru.

Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe juga ikut dalam melakukan pengeseran anggaran sebanyak Rp 35 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sangihe 2020 untuk penanganan wabah Covid-19. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Gaghana mengatakan, untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 Pemkab Sangihe telah menggeser beberapa mata anggaran.

"Ada beberapa mata anggaran yang digeser untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 diantaranya Biaya Tidak Tetap (BTT) 20 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 9 miliar dan Dinas Kesehatan 5 miliar, dengan total kurang lebih Rp 35 miliar," kata Gaghana.

Saat dikonfirmasi juga, Wa-

li Kota Bitung Maximillaan Jonas Lomban mengatakan, Pemkot Bitung telah melakukan pengeseran anggaran di sejumlah Perangkat Daerah. Hal itu sudah dilakukan sejak 16 Maret 2020 lalu. "Sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 15 Maret sudah dirancang bersama beberapa SKPD, terkait pengeseran anggaran dalam rangka pencegahan Covid-19 di Kota Bitung," ungkap Lomban. Dana yang digeser untuk pencegahan Covid-19, Rp 8 miliar dan sudah dilakukan sejak 16 Maret 2020 lalu. "Hal itu dilakukan berdasarkan hasil rapat semua tim Covid-19. Sebab ada beberapa yang diharuskan dilakukan pengeseran, dan semua sudah berjalan," ujarnya. Sementara itu diketahui, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) juga ikut mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 3,5 miliar.

Disisi lain, Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra) juga ikut gelontorkan dana sebesar Rp 14,8 Miliar untuk penanganan Covid-19 di wilayahnya. Hal tersebut diungkapkan Bupati James Sumendap (JS) belum lama ini. "Anggaran yang disediakan Pemkab ada sebanyak Rp 14,8 Miliar untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten kita. Anggaran ini, diambil dari pengeseran anggaran program setiap SKPD. Selain itu, kita juga potong dari anggaran perjalanan dinas dari bupati hingga anggota DPRD Mitra," ungkapnya.

Sementara itu, dana penanganan Covid-19 juga ikut disiapkan Pemkab Minahasa Utara (Minut) sebesar Rp 12 miliar. Jumlah itu disepakati dalam rapat pembahasan antara Pemkab dan DPRD terkait rasionalisasi pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), belum lama ini. Ketua DPRD Minut Denny Lolong mengatakan, total Rp 12 miliar berdasarkan 2 kali tahapan permintaan anggaran dari Pemkab Minut. Pertama, surat Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan tanggal 24 Maret 49/ASS II/III/2020 yang ditandatangani oleh Asisten II Allan Mingkid ditujukan kepada pimpinan DPRD Minut senilai Rp 4 miliar. Dan kedua, surat Bupati Minahasa Utara tanggal 28 Maret 2020, terkait tambahan pengajuan anggaran sebesar Rp 8 miliar. "Sumber dananya dari rasionalisasi anggaran di sejumlah OPD dan Sekretarisat DPRD Minut. Berapapun yang akan diambil dari Sekretarisat DPRD kami tetap setuju, asalkan semua pengeseran anggaran dari APBD tahun 2020 ini dipergunakan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Minut sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri," kuncinya. (***)

ordina:
"PBB
membu
da kon
bahwa
solidai
yang t
dapat
Peran
resolu
kerja
untuk
baran
melah
kerja s
ilmu
dariti
Ret
resol
pera
Orga
da di
sem
inter
reso

12 |
Sami

Be
bar
disi
Koc
Pol
Pre
Wa
di l
Ro
me
err
"
Mu
ru
Ti
di
di
hu
J
ga
ce
ac
bi
an
n
d
k
k
s
r